KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Sanksi Sosial untuk Anggota Membolos
Tanggal : Sabtu, 05 Oktober 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

Sanksi Sosial untuk Anggota Membolos

● ARIF SATRIO NUGROHO

JAKARTA—Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Kuskridho Ambardi menilai, perlu adanya sanksi sosial bagi anggota DPR yang membolos saat rapat kerja. Menurutnya, persoalan membolos saat kerja yang terjadi di lembaga legislatif tersebut hampir selalu berulang. Yang paling ironis, baru sehari dilantik menjadi anggota DPR, mereka sudah membolos pada sidang paripurna yang digelar pada Rabu (2/10) lalu.

Tercatat, sebanyak 335 anggota legislatif tidak hadir dari jumlah seluruhnya 711 anggota DPR dan DPD. "Sanksi sosial mungkin lebih bagus, dimulai dari memublikasi nama yang tidak hadir dan datanya dapat diakses oleh publik," ujar Kuskridho saat dihubungi, Jumat (4/10).

> **Denda mungkin tidak akan berpengaruh, sebab gaji mereka sudah besar.**

Ia menjelaskan, anggota dewan saat ini seperti tidak jera jika hanya diberi sanksi berupa denda. Sebab, hal tersebut hanya akan mengurangi sedikit dari pendapatan mereka. "Denda mungkin tidak akan berpengaruh, sebab gaji mereka sudah besar dan bahkan sebagian dari mereka tidak memerlukan gaji," ujar Kuskridho.

Sikap anggota DPR yang sering membolos saat rapat paripurna usai pelantikan juga membuatnya heran. Bahkan, beberapa di antaranya sudah disorot oleh media, tapi hal itu tak kunjung berubah menjadi lebih baik. Jika begitu, hal tersebut akan langsung memperburuk citra DPR yang diharapkan masyarakat berubah periode sebelumnya. Sebab, impresi pertama dari anggota DPR diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya kepada wakil rakyatnya.

"Kalau melihat sejarah panjang kehadiran anggota DPR dalam sidang pleno, tampaknya kebiasaan absen itu sangat biasa. Sepertinya ada problem etis dalam kultur DPR," ujar Kuskridho. Peniliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga menyindir tingkat kehadiran anggota DPR periode 2019-2024. Dia mempertanyakan komitmen anggota parlemen yang baru dilantik pada Selasa (1/10) itu.

Lucius menilai, anggota dewan itu telah mengabaikan komitmen Ketua DPR Puan Maharani yang ingin meningkatkan rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR dan budaya titip absen saat rapat. Puan bahkan sudah berjanji akan mencari formula komitmen untuk hadir dalam tiap rapat. "Padahal, kemarin Puan Maharani baru saja menyentil soal kehadiran ini. Belum juga lewat sehari, komitmen Ketua DPR baru sudah berani diabaikan oleh anggota DPR," ujar Lucius.

Sementara, Puan beralasan kehadiran anggota legislatif belum diabsen. Jadi, politikus PDIP ini menilai wajar masih banyak anggota yang belum hadir saat sidang paripurna. Puan mengklaim, banyak anggota yang hadir saat dirinya dilantik pada Selasa (1/10) lalu. Namun, ia berdalih, daftar absen belum disediakan. ■ nawir arsyad akbar **ed:** agus raharjo